



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH POSYANDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KELURAHAN CIBEBER KOTA CIMAHI

Jayanti Herawati¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Yamardi³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat oleh Posyandu dalam upaya pencegahan stunting di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, yang mencatat 196 kasus (14,76%) pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan kerangka teori pemberdayaan Julian Rappaport yang berfokus pada dimensi kontrol, kesadaran kritis, dan partisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum berjalan optimal. Hal ini diidentifikasi dari kewenangan kader yang masih terbatas pada level teknis, kesadaran kritis masyarakat yang belum mendalam mengenai akar masalah stunting yang multi-dimensi, serta tingkat partisipasi yang masih dominan bersifat fungsional daripada substantif. Disimpulkan bahwa efektivitas pemberdayaan terhambat oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, literasi kesehatan yang bervariasi, dan paradigma program yang masih top-down. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas fasilitasi kader, replikasi inisiatif swadaya masyarakat, dan sinergi lintas sektor yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pencegahan stunting di tingkat komunitas.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Posyandu, Teori Rappaport.

Abstract

Stunting is a serious public health problem in Indonesia. This study aims to examine the process of community empowerment by Posyandu (Integrated Health Post) in stunting prevention efforts in Cibeber Urban Village, Cimahi City, which recorded 196 cases (14.76%) in 2024. The research method used is descriptive qualitative with Julian Rappaport's empowerment theory framework, focusing on the dimensions of control, critical awareness, and participation. Data were collected through in-depth interviews and observation. The results show that the empowerment process has not been optimal. This is identified by the cadres' authority being limited to a technical level, a lack of deep critical awareness among the community regarding the multi-dimensional root causes of stunting, and a level of participation that remains predominantly functional rather than substantive. It is concluded that the effectiveness of empowerment is hindered by factors such as economic limitations, varied health literacy, and a persistent top-down program paradigm. Therefore, a strategy to

strengthen cadres' facilitation capacities, replicate community self-help initiatives, and foster stronger cross-sectoral synergy is required to optimize stunting prevention at the community level.

Keywords: *Community Empowerment, Posyandu, Rappaport Theory.*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurut laporan World Health Organization (WHO, 2020), lebih dari 149 juta anak balita di dunia mengalami stunting, dan sebagian besar berada di negara berkembang. Di Indonesia, prevalensi stunting masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) mencatat angka stunting sebesar 30,8%, kemudian menurun menjadi 24,4% berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021. Meski mengalami penurunan, angka ini masih berada di atas standar maksimal WHO, yaitu 20%, sehingga Indonesia menempati urutan keempat tertinggi jumlah kasus stunting di dunia setelah India, China, dan Nigeria.

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Namun, hingga kini permasalahan stunting tetap menjadi isu serius di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus stunting tertinggi di Indonesia (BKPK, 2025).

Kota Cimahi merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI, 2024), prevalensi stunting di Kota Cimahi tercatat sebesar 22,3%. Di tingkat kelurahan, khususnya Cibeber, jumlah kasus stunting menunjukkan tren

fluktuatif. Pada tahun 2022 tercatat 179 balita (13,5%), meningkat menjadi 199 balita (15%) pada 2023, lalu menurun sedikit menjadi 196 balita (14,76%) pada 2024 (Puskesmas Cibeber, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya intervensi, prevalensi stunting masih relatif tinggi dan perlu mendapat perhatian serius.

Pemerintah setempat telah mengandalkan Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat sekaligus basis pemberdayaan dalam pencegahan stunting. Posyandu di Kelurahan Cibeber tersebar di 14 RW dengan total 23 titik layanan, masing-masing melayani sekitar 50–60 balita. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh intervensi top-down, melainkan juga oleh keterlibatan aktif masyarakat. Di sinilah konsep pemberdayaan masyarakat menjadi penting. Rappaport (1987) dalam (Margayaningsih, 2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses di mana individu, organisasi, dan komunitas memperoleh kendali (control), kesadaran kritis (critical awareness), serta partisipasi dalam mengelola kehidupan mereka. Dengan demikian, kader Posyandu bukan hanya pelaksana teknis layanan kesehatan, tetapi juga fasilitator perubahan sosial di tingkat komunitas.

Dalam konteks pencegahan stunting, pemberdayaan kader Posyandu mencakup tiga aspek utama. Pertama, kontrol, yaitu penguatan kapasitas kader agar dapat membantu keluarga mengelola kesehatan anak dan pemenuhan gizi secara mandiri. Kedua, kesadaran kritis, yakni pemahaman kader mengenai stunting sebagai masalah struktural yang melibatkan aspek sosial-ekonomi, sanitasi, hingga pola asuh. Ketiga, partisipasi, yaitu keterlibatan aktif kader dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pencegahan stunting yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui Posyandu di Cibeber belum sepenuhnya optimal. Masih rendahnya tingkat pengetahuan gizi ibu balita, keterbatasan akses pangan bergizi, serta lemahnya konsistensi partisipasi masyarakat menjadi indikator kendala yang dihadapi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh*

Posyandu dalam pencegahan stunting di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Posyandu dalam proses pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada dinamika kontrol, kesadaran kritis, dan partisipasi sebagaimana dijelaskan dalam teori pemberdayaan Rappaport. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu serta rekomendasi strategis untuk mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu dalam pencegahan stunting. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna di balik fenomena, menelusuri pengalaman para informan, serta mengidentifikasi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Kelurahan Cibeber. Dengan metode deskriptif, penelitian ini tidak hanya menyajikan data empiris, tetapi juga memberikan penjelasan komprehensif mengenai pola-pola interaksi, peran aktor, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilihan lokasi didasarkan pada data Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang menunjukkan bahwa Kelurahan Cibeber merupakan salah satu wilayah dengan angka stunting relatif tinggi dibandingkan kelurahan lain. Selain itu, wilayah ini memiliki jaringan Posyandu yang aktif sehingga relevan untuk diteliti sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Agustus 2025.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam program pencegahan stunting baik sebagai pengambil kebijakan, pelaksana, maupun penerima manfaat. Informan penelitian terdiri atas Kepala DP3AP2KB Kota

Cimahi, Kepala Puskesmas Cibeber, Lurah Cibeber, bidan kelurahan, enam orang kader Posyandu, tiga tokoh masyarakat, dan lima orang ibu balita. Komposisi informan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pemberdayaan dari perspektif pemerintah, tenaga kesehatan, kader, masyarakat, dan keluarga penerima manfaat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tiga dimensi teori pemberdayaan Julian Rappaport, yaitu kontrol, kesadaran kritis, dan partisipasi. Wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi detail tentang peran kader, tingkat pemahaman masyarakat, serta bentuk partisipasi warga dalam pencegahan stunting. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri kegiatan Posyandu untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi antara kader, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Observasi ini memberikan pemahaman mengenai sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan bulanan Posyandu, data kesehatan Puskesmas, serta dokumen kebijakan terkait stunting.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, kader, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh lebih dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Posyandu di Kelurahan Cibeber berperan signifikan dalam pencegahan stunting, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan partisipatif. Secara geografis dan demografis, Kelurahan Cibeber merupakan wilayah padat penduduk dengan tingkat kepadatan 9.285 jiwa/km² dan jumlah balita mencapai 2.004 jiwa. Tingginya kepadatan disertai angka stunting sebesar 9,8% memperlihatkan adanya tekanan besar terhadap layanan dasar, terutama Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan komunitas. Kondisi sosial-ekonomi yang didominasi oleh sektor informal serta variasi tingkat pendidikan menambah kompleksitas masalah gizi dan kesehatan anak.

Dari sisi kelembagaan, Posyandu di Cibeber relatif kuat dengan dukungan 23 unit aktif, 164 kader, serta sinergi lintas sektor dengan Puskesmas, PKK, dan lembaga masyarakat lainnya. Hal ini memperlihatkan adanya potensi yang cukup besar untuk menggerakkan program kesehatan berbasis komunitas. Temuan penelitian menunjukkan tiga dimensi utama pemberdayaan:

Pertama, dimensi kontrol berkaitan dengan sejauh mana individu atau kelompok memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pencegahan stunting, kader Posyandu di Kelurahan Cibeber memiliki kewenangan pada aspek teknis, seperti melakukan penimbangan balita, pencatatan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), serta memberikan penyuluhan dasar tentang gizi. Kewenangan ini menunjukkan bahwa kader telah berperan sebagai ujung tombak layanan kesehatan dasar. Namun, keputusan strategis seperti perumusan program, alokasi anggaran, maupun penentuan prioritas intervensi tetap berada di tangan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan profesional. Hal ini membuat peran kader cenderung terbatas pada pelaksanaan teknis semata.

Keterbatasan kontrol ini berimplikasi pada rendahnya kemandirian masyarakat dalam mengelola program pencegahan stunting. Sebagian kader

menyampaikan bahwa mereka sering hanya mengikuti arahan dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan tanpa dilibatkan dalam perencanaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Firmawati (2024) yang menyatakan bahwa peran kader Posyandu di banyak daerah masih sebatas pelaksana, bukan pengambil keputusan. Padahal, pemberdayaan masyarakat yang ideal menempatkan kader dan warga sebagai subjek utama yang memiliki ruang untuk berinisiatif.

Kedua, kesadaran kritis masyarakat mengenai stunting mulai terbentuk seiring adanya berbagai kegiatan penyuluhan gizi yang dilakukan di Posyandu. Ibu-ibu balita mulai memahami bahwa stunting bukan hanya masalah tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut perkembangan kognitif, motorik, dan kesehatan jangka panjang. Beberapa ibu mengaku baru mengetahui bahwa praktik pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat atau kebiasaan sanitasi yang buruk dapat berkontribusi pada stunting. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan berkat edukasi dari kader dan tenaga kesehatan.

Namun, kesadaran kritis tersebut belum merata di seluruh masyarakat. Informasi mengenai stunting cenderung lebih mudah diterima oleh kelompok ibu muda dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, sedangkan ibu dengan pendidikan rendah masih kesulitan memahami pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang benar. Selain itu, faktor budaya juga memengaruhi kesadaran masyarakat. Beberapa warga masih percaya pada mitos pemberian makanan tertentu bagi balita yang justru berpotensi menghambat pemenuhan gizi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan literasi gizi harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Jika dibandingkan dengan penelitian Fitri dan Surya (2024), kesadaran kritis masyarakat Cibeber masih relatif rendah. Penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat desa yang diberikan pelatihan berkelanjutan mampu mengembangkan pemahaman lebih baik mengenai faktor penyebab stunting dan aktif dalam merumuskan solusi lokal. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya kesinambungan program edukasi agar kesadaran kritis masyarakat benar-benar dapat mengakar.

Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu di Kelurahan Cibeber relatif baik pada tataran fungsional. Warga, terutama ibu balita, hadir secara rutin dalam kegiatan penimbangan dan menerima penyuluhan gizi. Beberapa warga juga terlibat dalam kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) yang didukung oleh dana swadaya maupun bantuan pemerintah. Partisipasi ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Namun, jika ditinjau dari segi substantif, partisipasi masyarakat masih rendah. Warga jarang dilibatkan dalam proses perencanaan program Posyandu, sehingga kontribusi mereka lebih banyak sebatas mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan. Partisipasi semacam ini lebih mencerminkan keterlibatan pasif daripada keterlibatan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagai subjek pembangunan, melainkan masih ditempatkan sebagai objek yang menerima layanan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa model pemberdayaan di Kelurahan Cibeber masih bersifat hibrida, yakni memadukan pendekatan *top-down* dari pemerintah dengan partisipasi *bottom-up* yang masih terbatas. Agar partisipasi masyarakat meningkat, diperlukan ruang yang lebih besar bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengusulkan kegiatan, serta berperan dalam pengambilan keputusan.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting di Kelurahan Cibeber tidak terlepas dari berbagai hambatan. Pertama, faktor ekonomi keluarga yang masih rendah menyebabkan banyak orang tua kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Kedua, literasi kesehatan yang terbatas membuat sebagian warga kurang memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, keterbatasan jumlah kader Posyandu dan minimnya regenerasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan program. Keempat, budaya lokal dan mitos seputar pemberian makanan pada balita turut menjadi penghalang bagi penerapan praktik gizi yang tepat.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi kesehatan, tetapi harus

melibatkan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah daerah, kader, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasi kendala tersebut agar pemberdayaan benar-benar dapat berjalan efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu memperluas pelatihan kader Posyandu agar tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan manajerial dan advokasi. Kedua, literasi gizi masyarakat perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, seperti PKK dan karang taruna. Ketiga, diperlukan insentif dan dukungan yang memadai bagi kader agar mereka termotivasi serta mendorong regenerasi. Keempat, penting untuk memperkuat pendekatan bottom-up dalam perencanaan program kesehatan sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu tidak hanya dipahami sebagai pelayanan kesehatan dasar, melainkan sebagai strategi sosial yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi stunting. Jika kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, maka Posyandu dapat berkembang menjadi pusat pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Posyandu dalam pencegahan stunting di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, berjalan dalam pola hibrida yang memadukan pendekatan *top-down* dari pemerintah dengan partisipasi *bottom-up* yang mulai tumbuh di tingkat komunitas. Pada dimensi kontrol, kader Posyandu memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan kegiatan, seperti penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan, serta pemberian penyuluhan gizi. Namun, kewenangan tersebut belum mencakup aspek strategis karena perencanaan program dan pengambilan keputusan tetap didominasi oleh pemerintah daerah dan tenaga kesehatan profesional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian masyarakat masih terbatas.

Pada dimensi kesadaran kritis, masyarakat mulai memahami bahwa stunting merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan gizi, pola asuh, dan lingkungan. Penyuluhan yang dilakukan kader dan tenaga kesehatan berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ibu balita

mengenai pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup bersih. Akan tetapi, kesadaran ini belum merata karena sebagian masyarakat masih terikat pada keterbatasan pendidikan dan budaya lokal yang cenderung mempertahankan mitos seputar pola makan balita. Dengan demikian, kesadaran kritis masyarakat masih perlu diperkuat melalui edukasi berkelanjutan dan pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat.

Pada dimensi partisipasi, keterlibatan masyarakat lebih banyak terlihat pada aspek fungsional. Warga hadir secara rutin dalam kegiatan Posyandu, menerima penyuluhan, serta ikut serta dalam program pemberian makanan tambahan. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menjadi subjek pembangunan, melainkan masih diposisikan sebagai objek penerima layanan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, penguatan kapasitas kader Posyandu sangat penting, tidak hanya dalam aspek teknis tetapi juga manajerial agar mereka mampu terlibat dalam perencanaan program. Kedua, peningkatan literasi gizi masyarakat perlu dilakukan secara sistematis melalui sinergi dengan sekolah, PKK, dan tokoh masyarakat. Ketiga, regenerasi kader harus menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan program Posyandu. Keempat, pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan *bottom-up* agar masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam menyampaikan aspirasi, merancang program, dan mengambil keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Afriansyah, & dkk. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Haerana, F. A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Teori dan Praktik*. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama.
- Helmyati, S., & dkk. (2020). *STUNTING: Permasalahan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hikmahanto, H. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Moleong, J.L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Moleong, J.L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Praktis dalam Pembangunan Partisipatif*. Jakarta: Kencana.
- Z., A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Zubardi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Dokumen

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
Panduan Pelaksanaan Posyandu Aktif
World Health Organization (WHO)

Jurnal-jurnal

- BKPK, S. (2025, Mei 26). *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menetapkan target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 18,8% pada tahun 2025*. Retrieved from Kemenkes RI BKPK: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/>
- Ernawati, A. (2020). Gambaran Penyebab Balita Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Pati . *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* , 77-94.
- Firmawati. (2024, Juni 21). Retrieved from o <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7511/1/2020203870231009.pdf>
- Fitri, L., & Surya, M. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Posyandu Terhadap Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) di Desa Gelumpang Payung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. *Buletin Al-Ribaath*, 1-6.
- Fitriani, Y., & dkk. (2023). Peran Posyandu Sebagai Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jaya Asri. *BATIK: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultura*, 138-143.
- Hamdy, M. K. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 87-96.
- Has, D. F., & dkk. (2021). PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU DALAM PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING PADA BALITA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7-14.
- Hossain. (2021). The role of community organizing in improving maternal and child health: a systematic review. *Health Policy and Planning*, 735-753.
- Kholilah, N., & dkk. (2024). Peran Masyarakat Desa Rejosari dalam Mencegah Stunting pada Anak. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28-43.
- Koten, M. H., & Hurek, U. O. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Stunting Melalui Kegiatan Posyandu . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN}*, 2716-2723.
- Manalor, d. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kader Posyandu Cegah Stunting di Desa Oelnasi Wilayah Kerja Puskesmas Tarus . *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5364-5374.
- Margayaningsih, D. I. (2020). Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa . *Jurnal Elektronik Universitas TulungAgung*, 72-88.
- Munawaroh, & dkk. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Stunting Sejak Dini di Kecamatan Pagedogan Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan*, 231-242.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stuntingdan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 225-229.

Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 32-44.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024